

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal. 2009. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, and Nurmaningsih. 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: Raja Grifanindo Persada.
- Chozimah, Ali A. 2003. Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah, Sertipikat dan Permasalahannya. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, and Hilman. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Irawan, and Candra. 2010. Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Kurniati, Niar. 2016. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Melalui arbitrase Dalam Teori Dan Praktik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Murad, Rusmadi. 1977. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Santoso, Urip. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. N.p.: Kencana.

- Sembiring, Jimmy J. 2010. Panduan Mengurus Sertifikat Tanah. Jakarta: VisiMedia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar penelitian hukum. N.p.: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny H. 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2007. Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. N.p.: Sinar Grafika.
- Syarief, Elza. 2008. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tehupeiory, Aartje. 2012. Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta: RAIH ASA SUKSES.

Jurnal-Jurnal

- Ardani, Mira N. "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum." *Jurnal Gema Keadilan* 6, (3), 2019. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>
- Silviana, Ana. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 4, (1), 2021. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-%2068>
- Febriana, Novia Tika, and Murry D. A. 2023. "E-Journal Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya." *Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertipikat Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT) 1* (1):20.<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/download/125/121/417>.
- Worang, Ruth F. 2024. "Penerapan Asas Fungsi Sosial pada Ruang Atas Tanah." *Notary Law Journal* 3, no. 2 (Juli): 122. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i2.91>.

Wulansari, Retno D., Agung B. Prasetyo, and Triyono. 2017. "Diponegoro Law Journal." *Efektifitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*6, no. 2 (3). <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dir/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan perubahannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.